



# **LAPORAN KINERJA**

**PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**

**TAHUN 2017**

**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2017**

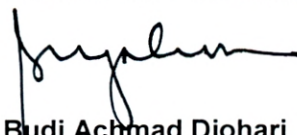
## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja bagi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah berhasil disusun dengan baik. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada Tahun 2017, dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban unit kerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini meliputi perencanaan kegiatan yang telah ditetapkan dan capaian kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama periode tahun anggaran 2017. Capaian kinerja tersebut berkaitan dengan rencana strategis yang telah ditetapkan dalam periode waktu 2015-2019. Dengan kata lain, tahun 2017 merupakan tahun ketiga bagi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam upaya mencapai tujuan Renstra 2015-2019.

Penyusunan laporan ini diharapkan bisa memberikan informasi yang akurat, relevan, dan transparan kepada masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan. Tersusunnya laporan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban anggaran dan kinerja kepada para pemangku kepentingan, sebagai materi evaluasi tahun-tahun berikutnya, dan sebagai bahan pertimbangan penyusunan anggaran dan penetapan kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun berikutnya.

Jakarta, Januari 2018  
Kepala Pusat Pendidikan  
Pancasila dan Konstitusi,



**Budi Achmad Djohari**  
NIP. 19650212 198603 1 002

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK) diberikan wewenang oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana tercantum dalam salah satu misi MK untuk meningkatkan pemahaman hak konstitusional warganegara. Sejalan dengan fungsi tersebut, kegiatan dan indicator kinerja Pusdik MK terfokus pada upaya untuk meningkatkan pemahaman hak konstitusional warga Negara. Penyusunan laporan kinerja tahun 2017 merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Pusdik MK.

Laporan kinerja Pusdik MK tahun 2017 disusun berdasarkan Penetapan Kinerja Eselon II yang memuat sasaran kegiatan (output). Adapun sasaran kegiatan (output) Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara dengan capaian 152,63 %. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2017, Pusdik MK telah memenuhi sasaran kegiatan (output) melebihi target.

Sasaran kegiatan (output) tersebut terbagi dalam lima indikator kinerja. Indikator kinerja yang pertama adalah persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan pengembangan program dan pengembangan program dan kurikulum pendidikan mencapai 100%. Indikator kinerja yang kedua, persentase tersusunnya dokumen penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan hak konstitusional warga negara mencapai 153%. Indikator kinerja yang ketiga merupakan tingkat layanan pendidikan dan pelatihan hak konstitusional warga negara mencapai indeks 3,3. Indikator kinerja yang keempat adalah persentase tersusunnya laporan evaluasi penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi mencapai 129%. Indikator kinerja yang terakhir adalah tingkat pemahaman hak konstitusional warga negara (bagi peserta diklat) mencapai skor 75.

Pencapaian kinerja tersebut didukung oleh penyediaan anggaran sebesar Rp.15.207.293.000,00 dengan penyerapan sebesar 99,21 %, yaitu dalam bilangan Rp.15.081.536.640,00. Capaian kinerja tersebut meningkat dari capaian kinerja tahun sebelumnya, yaitu peningkatan sebesar 75,08 %. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya budaya kerja yang lebih sistematis dan berorientasi pada hasil kerja. Pencapaian kinerja tahun 2017 juga didukung oleh 15 pegawai dengan latar belakang studi pada bidang pendidikan dan sosial.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Profil Organisasi Unit Kerja

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 11 ayat (3) huruf f Perpres tersebut, ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi –antara lain- Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Dalam rangka menyelenggarakan fungsi Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, maka di lingkungan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dibentuk Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pasal 13 ayat 2 dan 4). Perpres Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dijabarkan secara rinci melalui Peraturan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dirancang sebagai salah satu sarana untuk menopang MK sebagai pengawal dan penegak konstitusi melalui penguatan kelembagaan, organisasi dan sumber daya manusia, serta wadah yang dapat menginspirasi pemangku kepentingan dalam rangka merevitalisasi, reinternalisasi, dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dan konstitusi di tengah masyarakat bangsa Indonesia. Dengan niat dan prakarsa MK membangun pusat pendidikan Pancasila dan Konstitusi diharapkan benar-benar dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam mengedukasi dan penguatan kelembagaan melalui kerja sama antarlembaga di dalam maupun luar negeri.

Model pendidikan yang dikembangkan pada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menitikberatkan pada penguatan kapasitas dan pembentukan kepribadian yang luhur sebagai proses yang membebaskan (*freeing process*). Dengan model seperti ini diharapkan pada akhirnya dapat menghasilkan insan kamil yang tidak saja mengerti hak dan kewajiban konstitusionalnya, tetapi juga sanggup memperjuangkan hak-hak konstitusional tersebut, bahkan memberikan teladan bagi masyarakat di lingkungannya sehingga tercipta masyarakat yang mencerahkan (*enlightening society*). Demikian pula dari segi penyelenggaraan, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi diharapkan dapat menyelenggarakan kegiatan yang mendukung upaya mewujudkan *center of excellence*. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi secara manfaat bukan hanya untuk



Mahkamah Konstitusi akan tetapi Pusat Pendidikan Pancasila adalah milik bangsa Indonesia dalam rangka menumbuhkembangkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung semua niat baik dalam rangka menguatkan dan menanamkan kesadaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara kepada masyarakat maka diperlukan dukungan riil dalam sebuah program dan kegiatan yang nyata yang akan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Dukungan riil berkaitan dengan perangkat lunak berupa substansi pendidikan yang mumpuni maupun perangkat keras berupa fasilitas dan infrastruktur yang mampu mendukung proses pendidikan tersebut. Atas dasar pemikiran tersebut, MK merencanakan kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan hukum acara Mahkamah Konstitusi dengan berbagai pemangku kepentingan yang mempunyai peran strategis dalam proses pelaksanaan demokrasi, yang diharapkan masyarakat luas sebagai komponen negara dapat berperan aktif dalam menciptakan demokrasi yang bermartabat.

## **B. Aspek Strategis Unit Kerja**

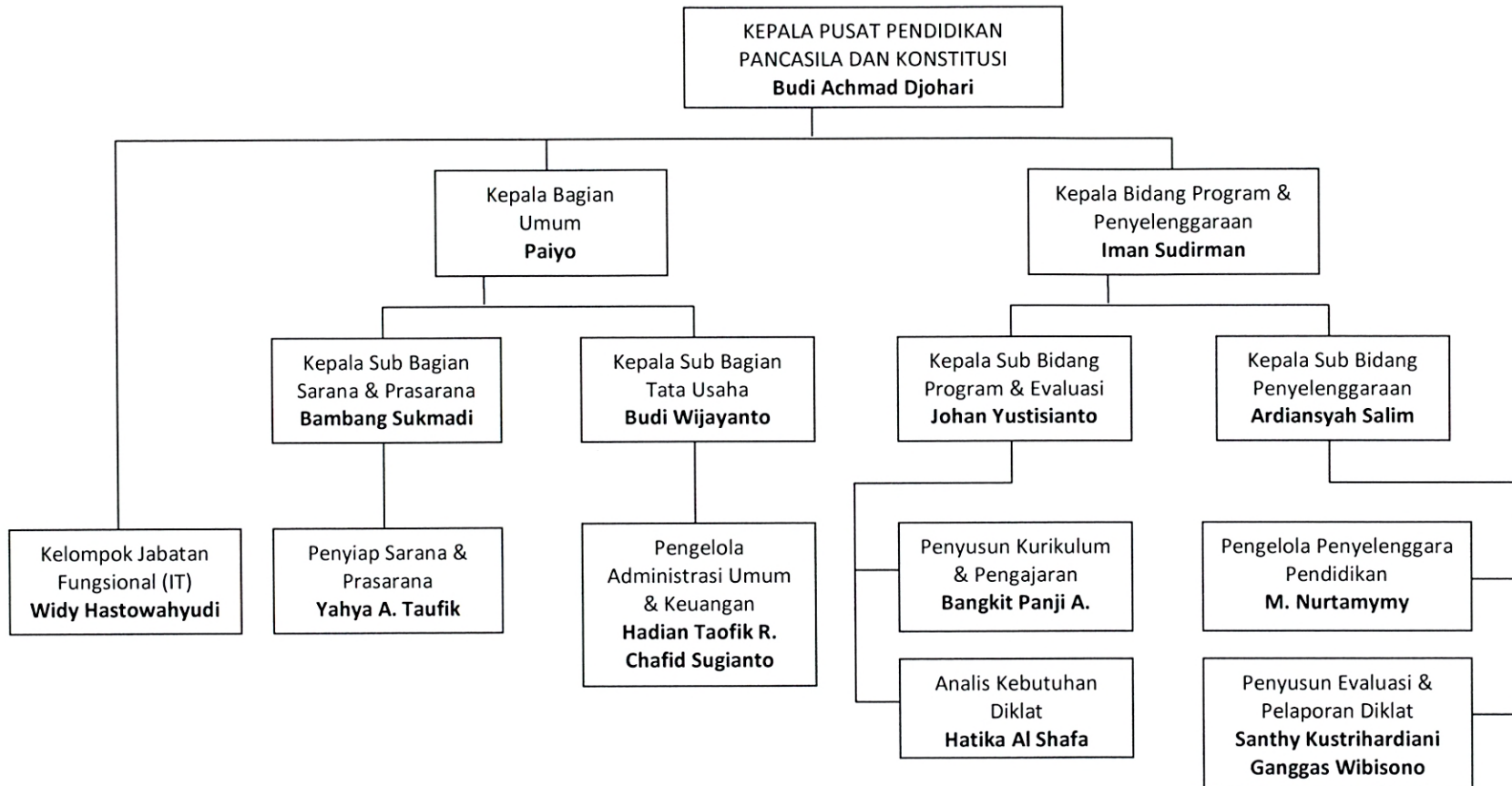
### **B.1. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Dalam pelaksanaan tugasnya, sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terdiri dari 16 orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (pejabat eselon II), 2 (dua) orang kepala bidang, yaitu Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan dan Kepala Bagian Umum (pejabat eselon III).

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan membawahi 2 (dua) kepala subbidang (pejabat eselon IV), yaitu Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi dan Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan, sementara Kepala Bagian Umum membawahi 2 (dua) kepala sub bagian (pejabat eselon IV), Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Selain itu, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 9 (sembilan) orang staf yang memiliki kompetensi di bidangnya, yang berlatar belakang teknologi informasi, teknologi pendidikan, sosiologi, dan psikologi.

Berikut gambaran struktur organisasi Pusdik MK.

**GRAFIK 1. STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI TAHUN 2017**



Dalam melaksanakan tugasnya secara spesifik, sub bidang program evaluasi memiliki fungsi perencanaan dan pengembangan program dan kurikulum pendidikan, serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi, sedangkan sub bidang penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Untuk bagian umum mempunyai fungsi penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengamanan dalam dan pengelolaan keuangan, administrasi kepegawaian, arsip dan dokumentasi serta ketatausahaan pusat.

## **B.2. Fasilitas Pendukung Pusdik MK**

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini didirikan di atas lahan seluas 14.282 m<sup>2</sup> berlokasi di Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, yang terdiri atas 7 bangunan utama dengan sarana dan prasarana, sebagai berikut:

- 1) **Grha Konstitusi I**, sebanyak 12 unit rumah penginapan bagi Narasumber;
- 2) **Grha Konstitusi II**, diperuntukkan sebagai ruang Perkantoran, Perpustakaan, dan Poliklinik;
- 3) **Grha Konstitusi III**, diperuntukkan sebagai ruang kelas utama dengan kapasitas 200 orang peserta didik, dan 8 ruang diskusi dengan kapasitas masing-masing 25 orang peserta didik;
- 4) **Grha Konstitusi IV** dan **Graha Konstitusi V**, diperuntukkan sebagai penginapan bagi 200 orang peserta didik;
- 5) **Grha Konstitusi VI**, sebanyak 6 unit rumah dinas jabatan;
- 6) **Grha Konstitusi VII**, diperuntukkan sebagai Ruang Makan Bersama dengan kapasitas 200 orang dan Mushola sebagai tempat beribadah umat muslim.

## **B.3. Pagu Anggaran Pusdik MK**

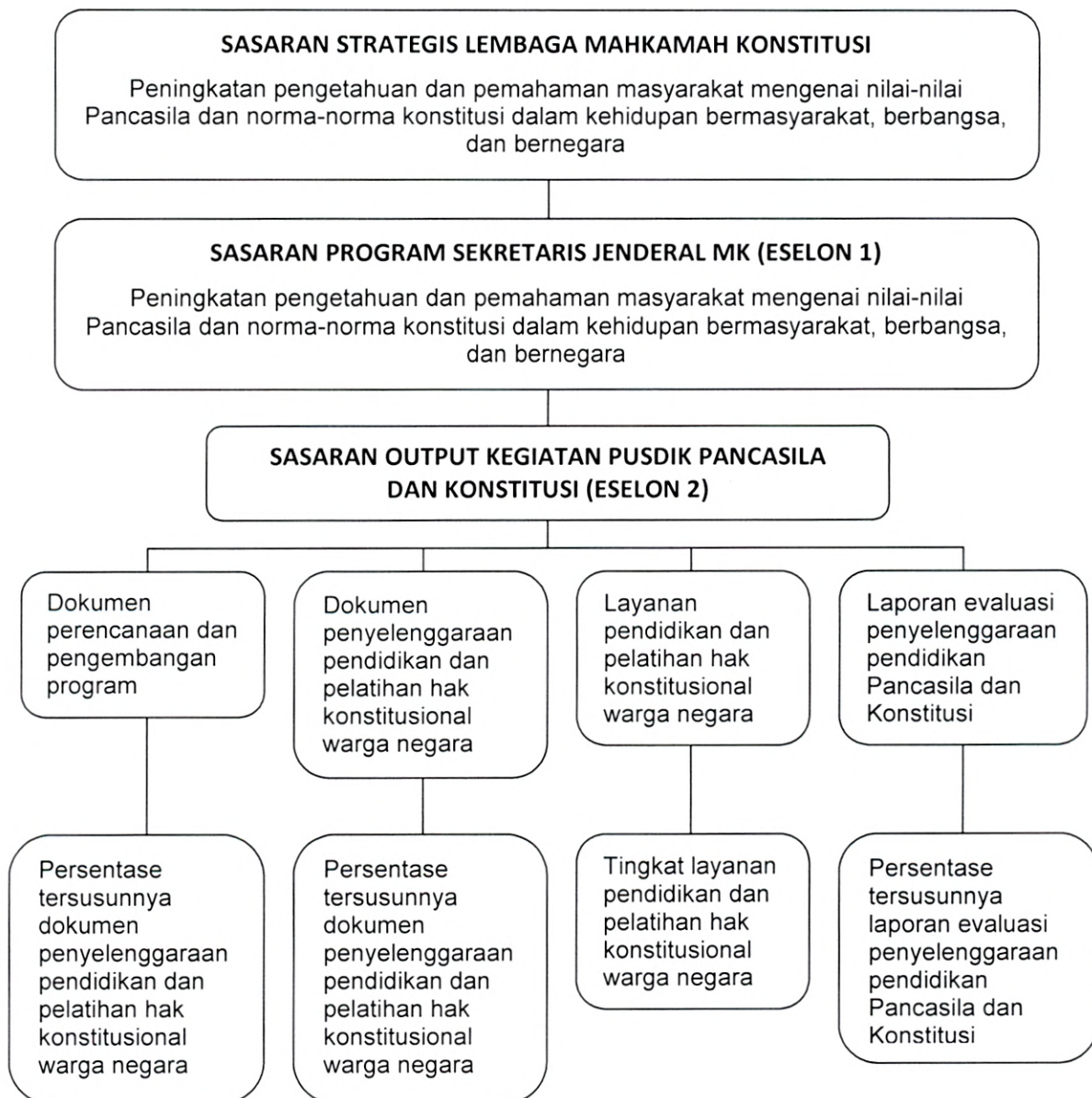
Pada tahun 2017, penyelenggaraan kegiatan Pusdik MK dibebankan pada anggaran DIPA dengan No. DIPA-077.01.1.653910/2017 Tanggal 7 Desember 2016. Pagu awal sebesar Rp 14.707.293.000,00 dilakukan revisi menjadi sebesar Rp.15.207.293.000,00.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan pada rencana strategis (Renstra) tahun 2015-2019, Pusdik MK telah merencanakan program kinerja sebagai baseline dalam menjalankan unit kerja. Adapun program tersebut adalah Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Sasaran program kegiatan pada tahun 2017 adalah **Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara**. Berikut peta konsep rencana kinerja Pusdik Pancasila dan Konstitusi disajikan dalam bentuk Cascading Sasaran Strategis ke Indikator Kinerja.

**Grafik 2. Cascading Sasaran Strategis ke Indikator Kinerja Pusdik Pancasila dan Konstitusi**



Sasaran kegiatan (output) Pusdik MK pada tahun 2017 terfokus pada pendidikan dan pelatihan hak konstitusional warga negara. Seperti pada tahun sebelumnya, output tersebut dicapai dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan hak konstitusional warga negara. Kegiatan tersebut meliputi sosialisasi pemahaman hak konstitusional warga negara, bimbingan teknis penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2017, fasilitasi peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara bagi Guru PKn se-Indonesia, dan fasilitasi peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan pengajaran mata kuliah serta praktik hukum acara peradilan konstitusi di Perguruan Tinggi.

Indikator kinerja pada sasaran kegiatan (output) Pusdik MK tahun 2017 seperti tersebut dalam **Grafik 2. Cascading Sasaran Strategis ke Indikator Kinerja Pusdik Pancasila dan Konstitusi** terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja. Berikut pemaparan indikator kinerja Pusdik MK beserta analisis capaian yang telah direncanakan selama tahun 2017.

### 1. Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Program dan Kurikulum Pendidikan

Basis yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan pendidikan di Pusdik MK adalah perangkat lunak dalam pendidikan. Perencanaan diperlukan dalam menyusun program kegiatan seperti apa yang akan dilaksanakan dalam tahun 2017. Perangkat lunak dalam pendidikan yang dikembangkan pada tahun 2017 adalah Kurikulum, Silabus, dan Media Pembelajaran untuk mendukung peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara.

Target dokumen perencanaan dan pengembangan program dan kurikulum pendidikan tercapai apabila jumlah dokumen tersebut sesuai dengan target berikut :

**Tabel 1. Target Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Program dan Kurikulum Pendidikan Tahun 2017**

| No | Keluaran (Output)   | Target (Dokumen) | Target (Presentase) |
|----|---|------------------|---------------------|
| 1  | Jumlah Kurikulum dan Silabus Pendidikan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara | 2 Keg/Dok        | 100%                |
| 2  | Jumlah Modul dan Buku Pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara                  | 3 Keg/Dok        | 100%                |
| 3  | Jumlah Dokumen Analisis Kebutuhan Diklat  | 1 Dok            | 100%                |
| 4  | Jumlah Dokumen Pedoman Rekrutmen Tenaga pengajar                                  | 1 Dok            | 100%                |



|   |  |                  |             |
|---|--|------------------|-------------|
| 5 | Jumlah Kegiatan Pelatihan Teknis Peningkatan SDM Penyelenggara dan Pengelola Pendidikan dalam Rangka Penerapan Manajemen ISO 9001:2008 | 2 Keg            | 100%        |
|   | <b>Total</b>   | <b>9 Keg/Dok</b> | <b>100%</b> |

Tercapainya dokumen perencanaan dan pengembangan program dan kurikulum pendidikan dihitung melalui persentase dengan membandingkan realisasi capaian dengan target. Berikut sistematika penghitungan tercapainya persentase dokumen perencanaan dan pengembangan program dan kurikulum pendidikan.

|  |   |
|--|---|
| <b>% tersusunnya dokumen perencanaan dan pengembangan program dan kurikulum pendidikan</b> | $= \frac{\text{Realisasi dokumen perencanaan dan pengembangan program dan kurikulum pendidikan}}{\text{Target dokumen perencanaan dan pengembangan program dan kurikulum pendidikan}} \times 100\%$ |
|--|---|

## 2. Persentase Tersusunnya Dokumen Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara

Pada awal tahun 2017, Pusdik MK merencanakan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan sebanyak 19 kegiatan. Pada masing-masing penyelenggaraan kegiatan diperoleh 1 dokumen laporan penyelenggaraan kegiatan, sehingga jumlah dokumen laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan hak konstitusional warga Negara yang direncanakan pada tahun 2017 sebanyak 19 dokumen. Persentase tersusunnya dokumen penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan hak konstitusional warga negara diukur melalui capaian laporan penyelenggaraan kegiatan dari jumlah total perencanaan pada tahun 2017 dikali 100 %. Penyelenggaraan kegiatan tersebut meliputi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Debat Konstitusi, Halaqah Konstitusi, Anugerah Konstitusi, dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi



**Tabel 2. Target Persentase Tersusunnya Dokumen Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2017**

| No | Nama Kegiatan   | Target (Dokumen) | Target (Persentase) |
|----|---|------------------|---------------------|
|    | <b>Triwulan 1</b>   |                  | <b>5,26%</b>        |
| 1  | Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Secara Serentak Tahun 2017 bagi Pengurus dan Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) | 1 Dokumen        |                     |
|    | <b>Triwulan 2</b>   |                  | <b>26,32%</b>       |
| 2  | Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus, Anggota, dan Pemangku Adat Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN)  | 1 Dokumen        |                     |
| 3  | Halaqoh Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus Masjid Se-Provinsi Sumatera Utara   | 1 Dokumen        |                     |
| 4  | Halaqoh Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus Masjid Se-Provinsi DI Yogyakarta  | 1 Dokumen        |                     |
| 5  | Halaqoh Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus/DKM Masjid Se-Jawa Barat  | 1 Dokumen        |                     |
|    | <b>Triwulan 3</b>   |                  | <b>68,42%</b>       |
| 6  | Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perwira Wanita Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)                              | 1 Dokumen        |                     |
| 7  | Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi Dosen dan Staf Pengajar Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI)   | 1 Dokumen        |                     |
| 8  | Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2017 Tahap Regional Barat  | 1 Dokumen        |                     |

|    |   |                   |             |
|----|---|-------------------|-------------|
| 9  | Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pembina Gerakan Pramuka Se- Indonesia  | 1 Dokumen         |             |
| 10 | Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2017 Tahap Regional Timur  | 1 Dokumen         |             |
| 11 | Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2017 Tahap Regional Tengah   | 1 Dokumen         |             |
| 12 | Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2017 Tahap Nasional  | 1 Dokumen         |             |
| 13 | Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pimpinan Organisasi Kepemudaan Partai Politik  | 1 Dokumen         |             |
|    | <b>Triwulan 4</b>   |                   | <b>100%</b> |
| 14 | Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Masyarakat Adat Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia (LEMTARI)   | 1 Dokumen         |             |
| 15 | Seminar Nasional dan Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Ketua Mahkamah Konstitusi Tahun 2017 & Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Peserta Kompetisi Peradilan Semu | 1 Dokumen         |             |
| 16 | Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Bagi Kepala Biro/Bagian Hukum Pemerintah Daerah Se-Indonesia Angkatan I Kerjasama Mahkamah Konstitusi Dengan Kementerian Dalam Negeri                              | 1 Dokumen         |             |
| 17 | Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Kongres Wanita Indonesia (KOWANI)   | 1 Dokumen         |             |
| 18 | Anugerah Konstitusi bagi Guru Pendidikan Kewarganegaraan Tingkat Nasional 2017  | 1 Dokumen         |             |
| 19 | Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Berprestasi Tingkat Nasional 2017  | 1 Dokumen         |             |
|    | <b>Total</b>  | <b>19 Dokumen</b> | <b>100%</b> |



### 3. Tingkat Layanan Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara

Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada warga Negara perihal Pancasila dan Konstitusi. Sedangkan prinsip penyelenggaraan kegiatan tersebut bertujuan pula untuk memberikan pelayanan yang utama kepada para peserta (warga Negara). Dalam upaya memberikan pelayan, Pusdik Pancasila dan Konstitusi meliputi empat subbidang dan subbagian berusaha untuk menerapkan layanan yang mampu mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Tingkat layanan diukur melalui penilaian kepuasan peserta terhadap beberapa aspek sebagai berikut :

**Tabel 3. Target Tingkat Layanan Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2017**

| No | Keluaran (Output)  | Target (Skor) |
|----|--|---------------|
| 1  | Indeks Tingkat Kepuasan Materi dan Bahan Ajar Pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara | 3,25          |
| 2  | Indeks Kualitas Narasumber Pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara                    | 3,25          |
| 3  | Indeks Kepuasan Dukungan Sumberdaya Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi         | 3,25          |

### 4. Persentase Tersusunnya Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada Tahun 2017 dilaksanakan melalui Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Output Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2017 merupakan dokumen laporan. Laporan tersebut berisikan deskripsi hasil evaluasi penyelenggaraan yang didapat melalui metode *Pre Test* dan *Post Test* serta dari data hasil kuesioner yang diisi oleh peserta didik

Rencana laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada Tahun 2017 yang disusun oleh Sub Bidang Program dan Evaluasi ditetapkan sebanyak 17 dokumen laporan. Dokumen tersebut diperoleh dari masing-masing penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara yang meliputi kegiatan Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan



Bimbingan Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Secara Serentak Tahun 2017. Persentase tersusunnya Laporan Evaluasi Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dicapai melalui penghitungan realisasi dokumen dibandingkan dengan target dokumen dikali 100 %.

**Tabel 4. Target Persentase Tersusunnya Laporan Evaluasi Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2017**

| No | Keluaran (Output)  | Target (Dokumen) | Target (Persentase) |
|----|--|------------------|---------------------|
| 1  | Dokumen Laporan Evaluasi Pendidikan Pancasila dan Konstitusi | 17               | 100%                |

#### 5. Tingkat Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (bagi Peserta Diklat)

Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara pada Tahun 2017 diberikan kepada beberapa target grup. Keragaman target grup tidak menjadi penghalang dalam melakukan pengukuran Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Pada Tahun 2017, pengukuran terhadap Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dilakukan dengan metode *Pre Test* dan *Post Test*. Bentuk kegiatan ini dilakukan sebagai langkah komprehensif untuk tetap melaksanakan pengukuran kegiatan evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara.

Target pengukuran Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara berupa Indeks Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Pada tahun 2017, indeks yang ditargetkan untuk dicapai Pusdik Pancasila dan Konstitusi sebesar skor 75. Skor 75 merupakan indeks dengan kategori baik.

**Tabel 5. Pengukuran Tingkat Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (bagi Peserta Diklat) Tahun 2017**

| No | Keluaran (Output)                                  | Target (Skor Post Test) | Target (Persentase) |
|----|--|-------------------------|---------------------|
| 1  | Rata-rata skor <i>Post Test</i> peserta pendidikan | 75                      | 100%                |

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Capaian sasaran kegiatan (output) Pusdik MK pada tahun 2017 yang terfokus pada Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dapat terlaksana dengan baik. Seperti pada tahun sebelumnya, output tersebut dicapai dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Kegiatan tersebut meliputi Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Bimbingan Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara Serentak pada Tahun 2017, Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru PKn se-Indonesia, serta Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pengajaran Mata Kuliah Serta Praktik Hukum Acara Peradilan Konstitusi di Perguruan Tinggi.

Berikut capaian sasaran kegiatan (output) Pusdik MK yang dituangkan dalam indikator kinerja beserta analisis capaian kinerja.

#### **1. Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Program dan Kurikulum Pendidikan**

##### **1.1. Uraian Capaian Kinerja**

Pusdik MK telah memiliki kurikulum induk sebagai dasar dalam menyusun program kegiatan yang selama ini dilaksanakan. Berdasarkan hasil evaluasi, kurikulum induk masih belum mencakup kriteria spesifik yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program kegiatan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengembangan kurikulum dan program pendidikan yang lebih menasar pada kriteria masing-masing target grup.

Kurikulum pendidikan yang dikembangkan pada tahun 2017 mengacu pada kurikulum induk tahun 2016. Jumlah dokumen pengembangan program dan kurikulum pendidikan sebanyak 2 (dua) dokumen. Persentase capaian tersusunnya dokumen perencanaan dan pengembangan program dan kurikulum pendidikan pada tahun 2017 sebesar 100 %. Berikut rincian dokumen yang telah disusun pada tahun 2017 dalam rangka pengembangan kurikulum pendidikan:



**Tabel 6. Realisasi Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Program dan Kurikulum Pendidikan Tahun 2017**

| No | Keluaran (Output)   | Realisasi (Dokumen)  | Realisasi (Presentase) |
|----|---|--|------------------------|
| 1  | Dokumen Perbaikan Kurikulum dan Silabus Pendidikan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara  | 2 Keg/Dok  | 100%                   |
| 2  | Dokumen Perbaikan Modul dan Buku Pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara   | 3 Keg/Dok  | 100%                   |
| 3  | Dokumen Analisis Kebutuhan Diklat   | 1 Dok  | 100%                   |
| 4  | Dokumen Pedoman Rekrutmen Tenaga pengajar   | 1 Dok  | 100%                   |
| 5  | Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Teknis Peningkatan SDM Penyelenggara dan Pengelola Pendidikan dalam Rangka Penerapan Manajemen ISO 9001:2008 | 2 Keg<br>Diklat MoT ( <i>Management of Training</i> ) dan ToT ( <i>Training of Trainer</i> ) bagi Penyelenggara Pendidikan | 100%                   |
|    | <b>Total</b>  | <b>9 Keg/Dok</b>   | <b>100%</b>            |

**1.2. Analisis Capaian Kinerja Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Program dan Kurikulum Pendidikan**

Capaian output dokumen perencanaan dan pengembangan program dan kurikulum pendidikan pada tahun 2017 dihitung melalui persentase dengan membandingkan realisasi capaian dengan target. Berikut sistematika penghitungan tercapainya persentase dokumen perencanaan dan pengembangan program dan kurikulum pendidikan.

|  |   |
|--|---|
| <b>% tersusunnya dokumen perencanaan dan pengembangan program dan kurikulum pendidikan</b> | $\frac{\text{Realisasi dokumen perencanaan dan pengembangan program dan kurikulum pendidikan}}{\text{Target dokumen perencanaan dan pengembangan program dan kurikulum pendidikan}} \times 100\%$ |
|--|---|



|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <b>% tersusunnya dokumen perencanaan dan pengembangan program dan kurikulum pendidikan</b> | - $\frac{9}{9} \times 100\% = 100\%$ |
|--|--------------------------------------|

## 2. Persentase Tersusunnya Dokumen Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara

### 2.1. Uraian Capaian Kinerja

Persentase tersusunnya dokumen penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara pada Tahun 2017 dicapai melalui pelaporan kegiatan Pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara. Kegiatan tersebut meliputi Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa, dan Anugerah Guru Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Tingkat Nasional.

Secara keseluruhan jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan di Pusdik MK sebanyak 29 kegiatan dari target awal yang ingin dicapai pada tahun 2017 sebanyak 19 kegiatan. Penambahan jumlah kegiatan karena ada optimalisasi anggaran dimana beberapa kegiatan dilaksanakan dengan *sharing funding* dengan mitra kerja.

Berikut rincian kegiatan Pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara yang telah dilaksanakan Pusdik MK:

**Tabel 7. Tersusunnya Dokumen Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara**

| No | Nama Kegiatan   | Realisasi (Dokumen) | Realisasi (Persentase) |
|----|---|---------------------|------------------------|
|    | <b>Triwulan 1</b>   |                     | <b>15,79%</b>          |
| 1  | Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2016 Universitas Atmajaya  | 1 Laporan           |                        |
| 2  | Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Secara Serentak Tahun 2017 bagi Pengurus dan Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) | 1 Laporan           |                        |

|    |  |           |               |
|----|--|-----------|---------------|
| 3  | Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Secara Serentak Tahun 2017 Bagi <i>Papua Lawyers Club</i>       | 1 Laporan |               |
|    | <b>Triwulan 2</b>  |           | <b>42,11%</b> |
| 4  | Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus, Anggota, dan Pemangku Adat Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN)           | 1 Laporan |               |
| 5  | Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pimpinan Organisasi Pemuda Mitra Institut Leimena   | 1 Laporan |               |
| 6  | Halaqoh Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus Masjid Se-Provinsi Sumatera Utara                            | 1 Laporan |               |
| 7  | Halaqoh Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus Masjid Se-Provinsi DI Yogyakarta                 | 1 Laporan |               |
| 8  | Halaqoh Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus/DKM Masjid Se-Jawa Barat                                     | 1 Laporan |               |
|    | <b>Triwulan 3</b>  |           | <b>94,74%</b> |
| 9  | Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perwira Wanita Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) | 1 Laporan |               |
| 10 | Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi Dosen dan Staf Pengajar Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI)                        | 1 Laporan |               |
| 11 | Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2017 Tahap Regional Barat   | 1 Laporan |               |
| 12 | Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pembina Gerakan Pramuka Se- Indonesia   | 1 Laporan |               |
| 13 | Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2017 Tahap Regional Timur   | 1 Laporan |               |



|    |   |           |                |
|----|---|-----------|----------------|
| 14 | Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2017 Tahap Regional Tengah   | 1 Laporan |                |
| 15 | Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Bagi Anggota Kongres Advokat Indonesia (KAI)   | 1 Laporan |                |
| 16 | Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2017 Tahap Nasional  | 1 Laporan |                |
| 17 | Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pimpinan Organisasi Kepemudaan Partai Politik  | 1 Laporan |                |
| 18 | Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Universitas Airlangga   | 1 Laporan |                |
|    | <b>Triwulan 4</b>   |           | <b>152,63%</b> |
| 19 | Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pengurus Dan Anggota Organisasi Kepemudaan Lintas Agama  | 1 Laporan |                |
| 20 | Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Masyarakat Adat Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia (LEMTARI)   | 1 Laporan |                |
| 21 | Seminar Nasional dan Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Ketua Mahkamah Konstitusi Tahun 2017 & Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Peserta Kompetisi Peradilan Semu | 1 Laporan |                |
| 22 | Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Bagi Kepala Biro/Bagian Hukum Pemerintah Daerah Se-Indonesia Angkatan I Kerjasama Mahkamah Konstitusi Dengan Kementerian Dalam Negeri                              | 1 Laporan |                |
| 23 | Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Kongres Wanita Indonesia (KOWANI)   | 1 Laporan |                |
| 24 | Anugerah Konstitusi bagi Guru Pendidikan Kewarganegaraan Tingkat Nasional 2017  | 1 Laporan |                |
| 25 | Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Berprestasi Tingkat Nasional 2017  | 1 Laporan |                |



|              |   |                   |                |
|--------------|---|-------------------|----------------|
| 26           | Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Bagi Kepala Biro/Bagian Hukum Pemerintah Daerah Se-Indonesia Angkatan II Kerjasama Mahkamah Konstitusi Dengan Kementerian Dalam Negeri | 1 Laporan         |                |
| 27           | Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pengurus dan Kader Penggerak Masyarakat Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)  | 1 Laporan         |                |
| 28           | Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang  | 1 Laporan         |                |
| 29           | Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado  | 1 Laporan         |                |
| <b>Total</b> |   | <b>29 Laporan</b> | <b>152,63%</b> |

## 2.2. Analisis Capaian Kinerja

Capaian output dokumen penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara pada Tahun 2017 dihitung melalui persentase dengan membandingkan realisasi capaian dengan target. Berikut sistematika penghitungan tercapainya persentase dokumen penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan hak konstitusional warga negara.

|   |   |
|---|---|
| <b>% tersusunnya dokumen penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan hak konstitusional warga negara</b> | $- \frac{\text{Realisasi dokumen penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan hak konstitusional warga negara}}{\text{Target dokumen penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan hak konstitusional warga negara}} \times 100\%$ |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| <b>% tersusunnya dokumen penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan hak konstitusional warga negara</b> | $- \frac{29}{19} \times 100\% = 152,63\%$ |
|---|---|

### **3. Tingkat Layanan Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara**

#### **3.1. Uraian Capaian Kinerja**

Tingkat layanan pendidikan dan pelatihan hak konstitusional warga Negara dicapai dengan melakukan pengukuran terhadap beberapa aspek berikut ini :

- a. Pengukuran Indeks Kepuasan Materi dan Bahan Ajar Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Indeks kepuasan materi dan bahan pendidikan diukur melalui kuesioner yang telah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Kuesioner diberikan kepada peserta pendidikan pada setiap penyelenggaraan kegiatan. Hasil kuesioner masing-masing kegiatan dirata-rata sehingga diperoleh Indeks Kepuasan Materi dan Bahan Ajar Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

- b. Pengukuran Indeks Kualitas Narasumber Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Performa narasumber dalam menyampaikan materi juga diukur menggunakan kuesioner yang diisi oleh peserta pendidikan. Kuesioner tersebut diberikan pada setiap sesi materi dalam setiap penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Hasil kuesioner masing-masing kegiatan dirata-rata sehingga diperoleh Indeks Kualitas Narasumber Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

- c. Pengukuran Indeks Kepuasan Dukungan Sumberdaya Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Dukungan sumberdaya kegiatan berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana menjadi aspek penilaian tingkat layanan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Pengukuran Indeks Kepuasan Dukungan Sumberdaya Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menggunakan kuesioner evaluasi kegiatan yang diberikan kepada peserta pendidikan di akhir setiap penyelenggaraan kegiatan. Hasil tersebut dirata-rata sehingga diperoleh Indeks Kepuasan Dukungan Sumberdaya Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



### 3.2. Analisis Capaian Kinerja

Tingkat Layanan Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara tahun 2017 diperoleh dari hasil rata-rata pengukuran Indeks Kepuasan Materi dan Bahan Ajar Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Indeks Kualitas Narasumber Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, dan Indeks Kepuasan Dukungan Sumberdaya Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Berikut adalah rinciannya

**Tabel 8. Tingkat Layanan Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2017**

| No | Keluaran (Output)   | Target (Skor) | Realisasi (Skor) |
|----|---|---------------|------------------|
| 1  | Indeks Tingkat Kepuasan Materi dan Bahan Ajar Pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara                    | 3,25          | 3,23             |
| 2  | Indeks Kualitas Narasumber Pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara                                       | 3,25          | 3,23             |
| 3  | Indeks Kepuasan Dukungan Sumberdaya Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi                            | 3,25          | 3,43             |
|    | <b>Rata-Rata Indeks Tingkat Layanan Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2017</b> | <b>3,25</b>   | <b>3,3</b>       |

## 4. Persentase Tersusunnya Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

### 4.1. Uraian Capaian Kinerja

Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara pada Tahun 2017 diukur dan dinilai melalui pelaporan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Evaluasi kegiatan meliputi evaluasi atas kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga dan Bimbingan Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Secara Serentak Tahun 2017. Metode yang digunakan dalam evaluasi adalah *Pre Test* dan *Post Test* yang bertujuan mengevaluasi kategori substansi Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara.



Secara keseluruhan jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan di Pusdik MK sebanyak 29 kegiatan, namun tidak semua kegiatan dalam bentuk Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara sehingga jumlah tersusunnya Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tidak sebanyak jumlah kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

**Tabel 9. Tersusunnya Laporan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara**

| No | Nama Kegiatan   | Realisasi (Dokumen) | Realisasi (Persentase) |
|----|---|---------------------|------------------------|
|    | <b>Triwulan 1</b>   |                     | <b>17,65%</b>          |
| 1  | Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2016 Universitas Atmajaya  | 1 Laporan           |                        |
| 2  | Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Secara Serentak Tahun 2017 bagi Pengurus dan Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) | 1 Laporan           |                        |
| 3  | Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Secara Serentak Tahun 2017 Bagi <i>Papua Lawyers Club</i>                                    | 1 Laporan           |                        |
|    | <b>Triwulan 2</b>   |                     | <b>47,06%</b>          |
| 4  | Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus, Anggota, dan Pemangku Adat Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN)  | 1 Laporan           |                        |
| 5  | Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pimpinan Organisasi Pemuda Mitra Institut Leimena  | 1 Laporan           |                        |
|    | <b>Triwulan 3</b>   |                     | <b>82,35%</b>          |
| 6  | Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perwira Wanita Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)                              | 1 Laporan           |                        |

|    |   |           |                |
|----|---|-----------|----------------|
| 7  | Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi Dosen dan Staf Pengajar Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI)   | 1 Laporan |                |
| 8  | Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pembina Gerakan Pramuka Se- Indonesia  | 1 Laporan |                |
| 9  | Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Bagi Anggota Kongres Advokat Indonesia (KAI)   | 1 Laporan |                |
| 10 | Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pimpinan Organisasi Kepemudaan Partai Politik  | 1 Laporan |                |
| 11 | Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Universitas Airlangga   | 1 Laporan |                |
|    | <b>Triwulan 4</b>   |           | <b>123,53%</b> |
| 12 | Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pengurus Dan Anggota Organisasi Kepemudaan Lintas Agama  | 1 Laporan |                |
| 13 | Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Masyarakat Adat Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia (LEMTARI)   | 1 Laporan |                |
| 14 | Seminar Nasional dan Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Ketua Mahkamah Konstitusi Tahun 2017 & Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Peserta Kompetisi Peradilan Semu | 1 Laporan |                |
| 15 | Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Bagi Kepala Biro/Bagian Hukum Pemerintah Daerah Se-Indonesia Angkatan I Kerjasama Mahkamah Konstitusi Dengan Kementerian Dalam Negeri                              | 1 Laporan |                |
| 16 | Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Kongres Wanita Indonesia (KOWANI)   | 1 Laporan |                |
| 17 | Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Berprestasi Tingkat Nasional 2017  | 1 Laporan |                |



|              |   |                   |                |
|--------------|---|-------------------|----------------|
| 18           | Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Bagi Kepala Biro/Bagian Hukum Pemerintah Daerah Se-Indonesia Angkatan II Kerjasama Mahkamah Konstitusi Dengan Kementerian Dalam Negeri | 1 Laporan         |                |
| 19           | Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pengurus dan Kader Penggerak Masyarakat Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)  | 1 Laporan         |                |
| 20           | Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang  | 1 Laporan         |                |
| 21           | Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado  | 1 Laporan         |                |
| <b>Total</b> |   | <b>21 Laporan</b> | <b>123,53%</b> |

#### 4.2. Analisis Capaian Kinerja

Capaian output dokumen laporan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada Tahun 2017 dihitung melalui persentase dengan membandingkan realisasi capaian dengan target. Berikut sistematika penghitungan tercapainya persentase dokumen laporan evaluasi penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

|  |   |
|--|---|
| <b>% tersusunnya dokumen perencanaan dan pengembangan program dan kurikulum pendidikan</b> | $\frac{\text{Realisasi dokumen laporan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan hak konstitusional warga negara}}{\text{Target dokumen laporan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan hak konstitusional warga negara}} \times 100\%$ |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>% tersusunnya dokumen perencanaan dan pengembangan program dan kurikulum pendidikan</b> | $- \frac{21}{17} \times 100\% = 123,53\%$ |
|--|---|

## 5. Tingkat Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (bagi Peserta Diklat)

### 5.1. Uraian Capaian Kinerja

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara yang telah terbukti memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan pemahaman hak konstitusional warga negara. Kontribusi tersebut terlihat dalam pengukuran *Pre Test* dan *Post Test* terhadap materi pendidikan yang diberikan kepada peserta selama sosialisasi dilaksanakan.

Realisasi Indikator Kinerja Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara adalah Skor 75 menyamai target awal yaitu Skor 75, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100%. Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian sasaran tersebut "**Berhasil**". Hasil ini juga menunjukkan adanya signifikansi peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara setelah mendapatkan materi dari Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

### 5.2. Analisis Capaian Kinerja

Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara diselenggarakan selama kurang lebih tiga hari. Pengukuran pemahaman materi Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada peserta menggunakan metode *Pre Test* dan *Post Test*. Soal *Pre Test* dan *Post Test* disusun berdasarkan materi utama Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, yang terdiri dari 5 (lima) pokok materi diklat sebagai berikut:

1. Pancasila
2. Konstitusi dan Konstitusionalisme
3. Negara Hukum dan Konstitusi
4. Sistem Pemerintahan Negara
5. Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan

Peserta pendidikan terdiri dari berbagai target group dan tingkatan usia. Berikut adalah rincian target grup kegiatan Pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Pemuda Lintas Agama dan Pemuda Lintas Partai Politik
2. Mahasiswa Fakultas Hukum
3. Dosen Fakultas Hukum
4. Advokat
5. Masyarakat Adat



6. Ormas Keagamaan
7. Ormas Perempuan
8. Penyelenggara Negara
9. Guru Pendidikan kewarganegaraan

Adapun hasil penilaian *Pre Test* dan *Post Test* untuk masing-masing kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**Tabel 10. Tingkat Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara berdasarkan Hasil Pre Test dan Post Test**

| No | Nama Kegiatan   | Jumlah Peserta | Nilai Pre Test | Nilai Post Test |
|----|---|----------------|----------------|-----------------|
|    | <b>Triwulan 1</b>   |                | <b>36,11</b>   | <b>76,11</b>    |
| 1  | Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Secara Serentak Tahun 2017 bagi Pengurus dan Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) | 150            | 34,44          | 81,11           |
| 2  | Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Secara Serentak Tahun 2017 Bagi <i>Papua Lawyers Club</i>                                    | 100            | 37,78          | 71,11           |
|    | <b>Triwulan 2</b>   |                | <b>34,72</b>   | <b>72,22</b>    |
| 3  | Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus, Anggota, dan Pemangku Adat Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN)  | 71             | 30,00          | 67,78           |
| 4  | Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pimpinan Organisasi Pemuda Mitra Institut Leimena  | 150            | 36,67          | 68,89           |
|    | <b>Triwulan 3</b>   |                | <b>43,33</b>   | <b>72,89</b>    |
| 5  | Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perwira Wanita Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)                              | 150            | 52,22          | 74,44           |
| 6  | Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi Dosen dan Staf Pengajar Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI)   | 144            | 54,44          | 82,22           |
| 7  | Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pembina Gerakan Pramuka Se- Indonesia  | 150            | 43,33          | 75,56           |

|    |   |     |              |              |
|----|---|-----|--------------|--------------|
| 8  | Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Bagi Anggota Kongres Advokat Indonesia (KAI)   | 150 | 34,44        | 67,78        |
| 9  | Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pimpinan Organisasi Kepemudaan Partai Politik  | 150 | 44,44        | 66,67        |
| 10 | Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Universitas Airlangga   | 100 | 65,56        | 73,33        |
|    | <b>Triwulan 4</b>   |     | <b>46,80</b> | <b>74,71</b> |
| 11 | Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pengurus Dan Anggota Organisasi Kepemudaan Lintas Agama  | 150 | 56,77        | 71,11        |
| 12 | Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Masyarakat Adat Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia (LEMTARI)   | 155 | 38,89        | 64,44        |
| 13 | Seminar Nasional dan Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Ketua Mahkamah Konstitusi Tahun 2017 & Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Peserta Kompetisi Peradilan Semu | 102 | 56,67        | 74,44        |
| 14 | Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Bagi Kepala Biro/Bagian Hukum Pemerintah Daerah Se-Indonesia Angkatan I Kerjasama Mahkamah Konstitusi Dengan Kementerian Dalam Negeri                              | 66  | 55,56        | 68,89        |
| 15 | Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Kongres Wanita Indonesia (KOWANI)   | 150 | 63,33        | 85,56        |
| 16 | Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Bagi Kepala Biro/Bagian Hukum Pemerintah Daerah Se-Indonesia Angkatan II Kerjasama Mahkamah Konstitusi Dengan Kementerian Dalam Negeri                             | 142 | 61,11        | 88,89        |
| 17 | Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pengurus dan Kader Penggerak Masyarakat Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)  | 150 | 30,00        | 87,78        |
|    | <b>Total</b>  |     | <b>47</b>    | <b>75</b>    |



Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan di Pusdik MK, nilai *Post Test* tertinggi diperoleh peserta Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Bagi Kepala Biro/Bagian Hukum Pemerintah Daerah Se-Indonesia Angkatan II Kerjasama Mahkamah Konstitusi Dengan Kementerian Dalam Negeri dengan skor 88,89, sedangkan nilai *Post Test* terendah diperoleh peserta Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Masyarakat Adat Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia (LEMTARI) dengan skor 64,44. Hal ini menandakan pemahaman materi pendidikan bagi peserta dengan target grup masyarakat adat masih rendah, sehingga diharapkan Pusdik MK dapat mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan untuk perbaikan kedepan.

Nilai rata-rata *Post Test* yang diperoleh 4356 orang peserta sosialisasi/bimtek tahun 2017 adalah sebesar 75, skor *Post Test* tersebut mengalami peningkatan sebesar 28 point dibanding rata-rata nilai *Pre Test* yaitu 47. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dari peserta setelah mengikuti pendidikan, terhadap pemahaman hak konstitusional warga negara. Nilai Indeks Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara ini sesuai dengan target awal yaitu 75, namun kedepan perlu ada perbaikan baik dari segi materi, metode pembelajaran, narasumber dan hal terkait lainnya sehingga nilai Indeks Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dapat terus meningkat.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pusdik MK telah melaksanakan kegiatan sebagaimana yang direncanakan dalam dokumen Renstra Mahkamah Konstitusi Revisi, Penetapan Kinerja Biro, DIPA dan POK Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi TA 2017. Capaian tersebut sebagaimana telah tergambar pada penetapan kinerja Pusdik MK pada tahun 2017 dan pencapaian hasil (akuntabilitas kinerja dan keuangan), baik secara administrasi maupun teknis dari program dan kegiatan seperti tercantum dalam pengukuran kinerja Pusdik MK.

Pada tahun 2017 capaian sasaran strategis Pusdik MK mencapai 123,53% dari target kinerja yang direncanakan. Capaian tersebut terdiri dari lima indikator kinerja utama yang menjadi metode pengukurannya. Pada kelima indikator tersebut, Pusdik MK telah meraih hasil melebihi target yang direncanakan sebelumnya. Hal ini menggambarkan bahwa akuntabilitas kinerja (capaian) telah dicapai dengan sangat baik.

Meskipun akuntabilitas kinerja telah dicapai dengan sangat baik, Pusdik MK senantiasa melakukan evaluasi terhadap kinerja. Evaluasi kinerja dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang menjadi objek langsung kegiatan pendidikan dan pelatihan Pancasila dan Konstitusi. Evaluasi dicapai melalui beberapa tindakan, diantaranya analisis saran dan kritik peserta pendidikan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan melalui observasi pegawai terhadap pelaksanaan kegiatan.

Berikut hasil analisis evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan performansi kinerja dan akuntabilitas kinerja unit Pusdik Pancasila dan Konstitusi :

- a. Meningkatkan pola kinerja yang lebih tersistem dan terstruktur, sehingga tidak ada ketergantungan berlebihan pada orang melainkan pada sistem;
- b. Meningkatkan kompetensi SDM dalam upaya menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat, khususnya peserta pendidikan di Pusdik MK;
- c. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran pegawai Pusdik MK untuk menerapkan manajemen kinerja;
- d. Memaksimalkan penggunaan fasilitas teknologi informasi yang telah dikembangkan untuk memudahkan kinerja;
- e. Memperbaiki penyusunan indikator kinerja dengan sasaran strategis yang sudah menjadi kebijakan di Renstra.